

**ADVOKASI KEBIJAKAN TERHADAP PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PARTAI
AMANAT NASIONAL DI KABUPATEN LANGKAT**

**(Studi Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat
Nasional Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

OLEH :

SHALSHA KHAIRUNNISA

198520167



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

**ADVOKASI KEBIJAKAN TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PARTAI AMANAT NASIONAL
DI KABUPATEN LANGKAT**

**(Studi Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat
Nasional Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



OLEH :

SHALSHA KHAIRUNNISA

198520167

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)12/9/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional di Kabupaten Langkat (Studi Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)
Nama : Shalsha Khairunnisa
Nim : 198520167
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Ililiana Hasibuan, M.Si



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol

Tanggal Lulus : 15 Agustus 2023

PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama : Shalsha Khairunnisa

NPM : 198520167

Program Studi : Adminitrasi Publik

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :

1. Peran Partai Amanat Nasional Dalam Pendidikan Politik (Studi Penelitian Kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)
2. Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat (Studi Penelitian Kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)

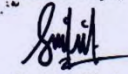
Dengan dosen pembimbing :

1. Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos,M.SI
2. Khairunnisah Lubis, S.Sos,M.I. Pol

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik

Medan,21 September 2022

Hormat Saya,



Shalsha Khairunnisa

Judul Peneitian yang disetujui No : (2)

Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat (Studi Penelitian Kantor Dewan Perwakilan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)

Dengan dosen pembimbing :

1. Ketua/ Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos.M.SI
2. Anggota/ Pembimbing II : Khairunnisah Lubis, S.Sos.M.I.Pol
3. Sekretaris : Khairullah,S.Ikom.M.Ikom

Catatan :


.....
.....
.....

Medan, 21 September 2022

Disetujui oleh

Ketua Program Studi Adminitrasi

Publik



Khairunnisah Lubis, S.Sos.M.I.Pol

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Agustus 2023



Shalsha Khairunnisa
Shalsha Khairunnisa

198529167

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalsha Khairunnisa

NPM : 198520167

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ADVOKASI KEBIJAKAN TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PARTAI AMANAT NASIONAL DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan

(Shalsha Khairunnisa)

198520167

ABSTRAK

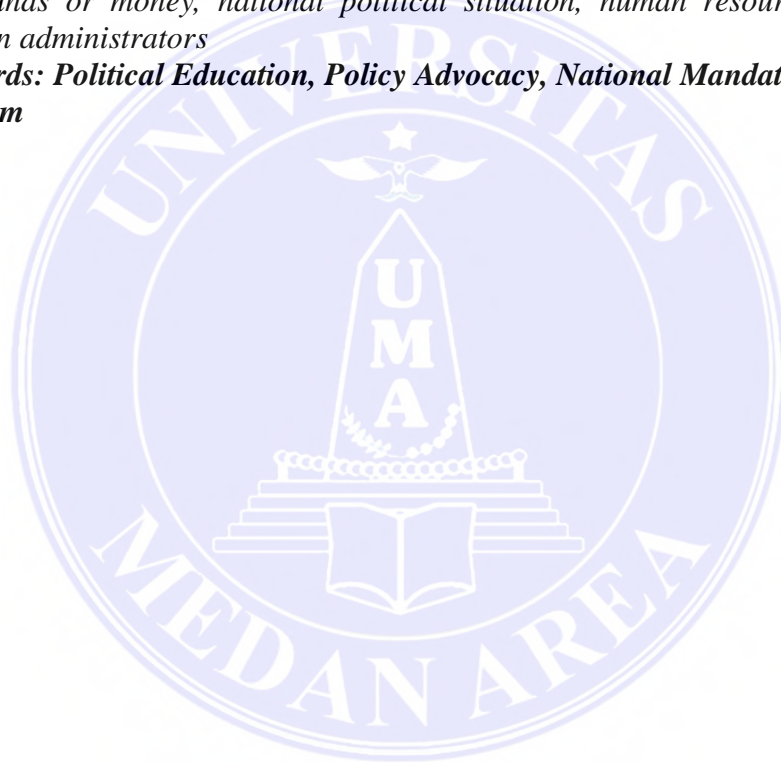
Program pendidikan politik masyarakat dilakukan PAN melalui reses dan mabita "Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat", bertujuan untuk mempermudah PAN dalam melaksanakan kegiatan serta mendengarkan inspirasi masyarakat Langkat. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat, bagaimana faktor penentu keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat Program Partai Amanat Nasional dalam advokasi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi, yaitu melakukan penelitian dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dan masyarakat. Kebijakan Advokasi Pendidikan masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah kepada Partai Politik. Kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Advokasi Pendidikan Politik terdapat faktor keberhasilan dan penghambat. Faktor keberhasilan adanya komitmen, adanya kesadaran, faktor penghambat, waktu pelaksanaan, luas wilayah, dana atau uang, situasi politik nasional, Sumber Daya Manusia, relasi antar pengurus

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Advokasi Kebijakan, Program Partai Amanat Nasional

ABSTRACT

Community political education programs are carried out PAN through recess and masa bimbingan anggota "Policy Advocacy for Community Political Education Through Programs Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat aims to make it easier Partai Amanat Nasional in carrying out activities and listening to community inspiration Langkat the problem in research is how to program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat in conducting policy advocacy for public political education, what are the determinants of policy success and program inhibiting factors Partai Amanat Nasional in policy advocacy for community political education. Public Education Advocacy Policy has received support from the Government for Political Parties. Policy Partai Amanat Nasional Success factors, commitment, awareness, inhibiting factors, implementation time, area size, funds or money, national political situation, human resources, relations between administrators

Keywords: Political Education, Policy Advocacy, National Mandate Party Program



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Shalsha Khairunnisa, dilahirkan di Medan pada tanggal 12 September 2001. Anak dari Ayah Winarno dan Ibu Siti Hadija. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis pernah bersekolah di TK Pelangi Medan pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 060834 Medan, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 19 Medan, dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA swasta Darussalam Medan. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGHANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan Syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Proposal ini adalah **“Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat”**. Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis pada Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, berbagai kendala harus dihadapi mulai dari pengajuan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda winarno dan Ibunda siti Hadijah yang dengan susah payah membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.

2. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing dua saya yang telah banyak memberikan masukan di dalam penyusunan skripsi saya
5. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.sos M,SI selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan skripsi saya
6. Bapak Khairullah Si.Kom,Mi Kom selaku Sekretaris sempro, semhas hingga sidang yang telah banyak memberikan masukan kepada skripsi saya
7. Seluruh staf Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
8. Seluruh staff serta kader-kader Partai Politik Amanat Nasional Kabupaten Langkat yang telah membantu penulis mendapatkan data dan mempermudah penelitian
9. Peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan dari masyarakat yang telah merespon peneliti dalam menemukan jawaban atas penelitian peneliti
10. Sahabat saya Cut elika yang telah mendengarkan keluh dan kesah saya dan menemani saya sewaktu penelitian.
11. Teman- teman seperjuangan angkatan 2019.

12. Ibuk Drg. Rinda Seba dan Om Drg. Welly Efendy Seba SP,BM yang telah memperkerjakan saya menjadi seorang asisten gigi di kliniknya dan selalu mensupport saya dalam menyelesaikan kuliah.
13. Abang Abdul Rafi Al qowi dan Adek Fathur Rahman Al hakim yang selalu menjadi semangat saya untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya, terkhusus buat abang saya abdulrafi al qowi semoga selalu di berikan kemudahan dalam setiap langkahnya menuju kesuksesan.
14. Akhi Maulana Abar dan Abang zi yang sudah mau membantu dan mensupport saya, terkhusus buat akhi Maulana Abar semoga di berikan kelancaran dalam menyelesaikan kuliahnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya

Hormat saya

Shalsha Khairunnisa

198520167

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGHANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Advokasi	8
2.2 Kebijakan	9
2.3 Advokasi Kebijakan	11
2.4 Program.....	12
2.5 Definisi Partai Politik	13
2.5.1 Fungsi Partai Politik.....	14
2.5.2 Tipe Partai Politik	17
2.6 Definisi Pendidikan Politik	18
2.6.1 Tujuan Pendidikan Politik	20
2.6.2 Fungsi Pendidikan Politik.....	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
2.8 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Partai Amanat Nasional	39
4.1.2. Visi dan Misi.....	41
4.1.3. Struktur Partai Amanat Nasional	42
4.1.4. Program Kerja Partai Amanat Nasional	43
4.2. Kebijakan Partai Amanat Nasional terhadap Advokasi Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Langkat.....	46
4.2.1. Kekuasaan	46
4.2.2. Legitimasi	49
4.2.3. Kredibilitas	53
4.2.4. Pertanggung Jawaban	57

4.3. Faktor Keberhasilan Serta Faktor Penghambat Kebijakan Partai Amanat Nasional Dalam Advokasi Pendidikan Politik.....	61
4.3.1 Faktor Keberhasilan	61
4.3.2 Faktor Penghambat	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2.Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



DAFTAR BAGAN

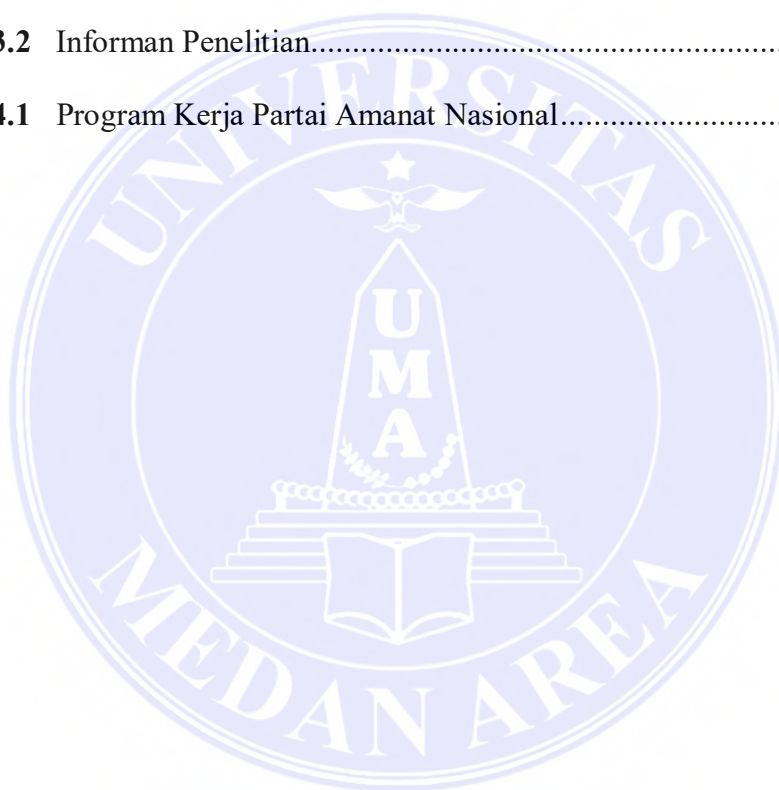
Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat	42



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Presentase Partisipasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Langkat tahun 2014 dan 2018	2
Tabel 2.1 Penellitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Program Kerja Partai Amanat Nasional.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2. Jawaban Wawancara	75
Lampiran 3. Dokumentasi	77
Lampiran 4. Surat Pengantar Riset Dari Kampus.....	83
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai serana pendidikan politik dan wadah pengkaderan politik yang mana nantinya kader-kader ini akan ikut serta dalam pemilihan di suatu daerah, dengan ikut serta dalam pendidikan politik, masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga Negara Indonesia. Partai politik harus menjalankan fungsi penting dalam serana pendidikan politik, sosialisasi politik sebagai wadah aspirasi dan partisipasi bagi masyarakat.

Pendidikan politik sangat penting di terapkan di masyarakat di karena pendidikan politik ini tidak akan lepas dari keberlangsungan hidup seseorang masyarakat di dalam sebuah aktivitasnya. Pendidikan politik di sini sebagai pendongkrak atau sebagai pengembangan berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan sangat bermanfaat bagi diri dan lingkungan, dengan mengubah dan membentuk tata perilaku masyarakat dengan tujuan untuk bertanggung jawab dalam partisipasi politik, serta memperluas pemahaman masyarakat, meningkatkan kualitas politik rakyat menuju peran aktif dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dan legislatif yang dilakukan di Indonesia setiap 5 (lima) kali setahun, merupakan salah satu cara mengukur indeks demokrasi di daerah tersebut dalam menentukan kesadaran masyarakat atas pentingnya berpolitik, dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif Kabupaten Langkat dapat

dilihat bagaimana kesadaran masyarakatnya dalam berpolitik, serta melihat bagaimana demokrasi daerah tersebut dalam partisipasi masyarakat dalam pemilihan di Kabupaten Langkat, dengan indeks presentasi sedang. Jika dilihat dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilih iyalah mereka yang menganggap pemilihan tidak begitu penting, sehingga banyak dari mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti menangkap ikan dilaut, berladang, dan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Langkat, Data tabel perbandingan presentase partisipasi pemilu Kepala Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2014 dan 2018.

Tabel Perbandingan Presentase Partisipasi Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Langkat Pada Tahun 2014 Dan 2018.

NO	Pemilu/Pilkada	Tahun	Presentase Pemilihan
1	Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat	2014	75,11 %
2	Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat	2018	73,24 %

Sumber : Tabel diolah oleh Peneliti 2022

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus ada pihak-pihak yang memberikan pengarahan pendidikan kepada masyarakat pentingnya menggunakan hak pilih, itu harus di lakukan oleh Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Pemerintah Kabupaten Langkat, Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat mengharapkan kepada partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik harus mencapai tujuan yang di harapkan dalam pendidikan politik yaitu : Peserta berani menolah Politik uang, peserta mengetahui modus-modus Politik uang dan upaya pencegahannya.

Partai Amanat Nasional yang memiliki 4 (empat) wakil di DPRD Langkat terus berupaya mempengaruhi kebijakan wakil partai politik yang duduk di DPRD Langkat, untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat di Kabupaten Langkat, pendidikan politik yang di lakukan oleh Partai Politik Amanat Nasional terbukti dengan adanya bebarapa program kerja Partai Politik Amanat Nasional yang di lakukan oleh Partai Politik Amanat Nasional yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu :

1. Partai Amanat Nasional melakukan masa bimbingan anggota yang biasanya di lakukan di awal pembentukan pengurus desa dengan membuat ranting pengurusan desa.
2. Partai Amanat Nasional melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dengan melakukan sosialisasi agar partai amanat nasional bertunduk pada masyarakat.
3. Partai Amanat Nasional melakukan reses bersama DPRD dengan menerangkan bagaimana visi dan misi partai amanat nasional yang di lakukan tiga tahun sekali.
4. Partai Amanat Nasional melakukan bimbingan teknis E- SAKSI dan E-KTA yang di buat secara online.

5. Partai Amanat Nasional melakukan sosialisasi Kegiatan Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) terhadap kader dan masyarakat guna untuk melakukan salah satu persiapan menghadapi pemilu 2024.

Partai Politik Amanat Nasional telah melakukan salah satu bukti dan upaya untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat Kabupaten Langkat, dalam upaya memberikan pendidikan politik masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat transformasi pendidikan politik, yang dilakukan oleh Partai Politik Amanat Nasional. Sehingga pendidikan politik tidak dapat dilakukan secara optimal meskipun dari Partai Politik Amanat Nasional sudah terbukti melakukan pendidikan politik di Kabupaten Langkat ini perlu adanya kerja sama dari seluruh elemen yang ada dalam Partai Politik Amanat Nasional.

Partai Politik Amanat Nasional dalam melakukan pengkaderan memberikan pengetahuan tentang partai politik serta fungsi dan wewenang partai dari anggota partai dengan begitu diharapkan kader partai politik dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta pengarahan dan menerima kritikan dan suara dari masyarakat yang akan disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Langkat. Partai Amanat Nasional dan kader partai diharapkan sebagai jembatan masyarakat dengan DPRD Langkat.

Partai Amanat Nasional juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal politik tidak hanya sekadar memilih calon A maupun B tapi politik punya arti yang sangat luas dan banyak maknanya bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang masih buta terhadap pendidikan politik, masyarakat sekarang kerap berpikir bahwa politik itu hanya urusan pemerintah dan elit-elit tertentu. Dampak dari sikap acuh tak acuh tersebut

banyak dari mereka yang gampang untuk dibohongi pada saat pemilu, banyak mereka yang sekadar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkontestasi.

Pengamatan dari hasil observasi lapangan terdapat fenomena yang timbul antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham dalam berpolitik, sehingga masyarakat tidak mengetahui peran aktifnya sebagai pengguna hak dan kewajiban politik.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui seberapa penting pendidikan politik dalam membangun demokrasi di Indonesia.
3. Kurang pedulinya masyarakat dalam berpartisipasi untuk memahami seberapa pentingnya pendidikan politik bagi aktivitas kehidupan sehari-hari.

Kajian ini memiliki relevansi terhadap administrasi publik di karenakan Organisasi publik dan Kebijakan bagian dari kajian kebijakan publik, serta Advokasi bagian dari upaya mempengaruhi keputusan atau kebijakan sehingga menjadi suatu kajian dalam kebijakan publik, Serta partai politik merupakan suatu media untuk mengantarkan warga negara menjadi legislatif di pemilu untuk menghasilkan kebijakan publik.

Adanya permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Langkat”**(Studi Kasus di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana faktor penentu keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Advokasi Kebijakan pendidikan politik masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat menarik tujuan yang ingin di capai dari seorang peneliti yaitu

1. Mengetahui sejauh mana Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat
2. Mengetahui lebih dalam tentang apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat kebijakan Partai Amanat Nasional dalam advokasi pendidikan politik masyarakat Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Partai Amanat Nasional dalam pendidikan politik sesuai dengan fungsi Partai

dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang fungsi Partai Politik, dan masyarakat dapat paham bagaimana hak dan kewajiban mereka untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, serta Partai Amanat Nasional akan mendapat percaya dari masyarakat Kabupaten Langkat.

2. Kegunaan bagi penulis dan Partai Amanat Nasional, dimana manfaat bagi penulis diharapkan dalam tulisan penulis dapat membantu Partai Amanat Nasional dalam membuat serta melakukan kebijakan dalam advokasi pendidikan politik masyarakat, Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam program Partai Amanat Nasional terhadap advokasi kebijakan terhadap pendidikan politik masyarakat Kabupaten Langkat. Serta diharapkan dengan tulisan ini masyarakat Kabupaten Langkat bisa mengetahui hak dan kewajiban dalam berpolitik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi persuasif yang berkaitan dengan strategi memenangkan argumen dan mengubah perilaku menunjuk pada usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan kekuasaan.

Kaminski dan Walmsley (1995) menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi, memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Valerie Miller dan Jane Covey (2005) mengemukakan bahwa advokasi merupakan pembangunan organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab dalam menyangkut segala peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana sebuah kekuasaan itu bekerja. Dimana advokasi ini bergerak untuk memusatkan perhatian banyak soal tentang apa yang di dapat masyarakat, seberapa mereka mendapatkannya, bagaimana keputusan-keputusan di buat, bagaimana sejumlah

orang di cegah untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan itu, bagaimana informasi di bagikan atau di sembunyikan.

Andrey Heywood (2018) politik merupakan suatu interaksi seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok tertentu untuk mengabil sebuah keputusan pada kelompok. Oleh karena itu politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota bahkan hingga di negara. Politik proses interaksi serta pembuatan keputusan. Mengacu pada beberapa pengertian di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa advokasi politik merupakan suatu tindakan, memberikan pengarahan kepada seseorang atau kelompok organisasi, untuk menilai serta menanggapi suatu kebijakan yang dikeluarkan.

2.2 Kebijakan

Valerie Miller dan Jane Covey (2005) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan aturan-aturan yang mengatur negara dan masyarakat untuk keamanan masyarakat. Kebijakan suatu pedoman atau dasar dari rencana penguasa untuk mempertahankan serta melindungi kekuasaan, dari orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan yang dia kendalikan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mempengaruhi tatanan serta pola pikir dari masyarakat terhadap penguasa.

Anderson dalam buku Dr. Arifin Tahir (2015) kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan untuk merubah perilaku seseorang atau kelompok guna menyelesaikan suatu masalah yang timbul dari suatu kebijakan yang di keluarkan.

Anderson membagi kebijakan politik menjadi dua yaitu :

1. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat.
2. kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Friedrich dalam buku widodo (2007) mengartikan kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Kebijakan dapat artikan sebagai bentuk keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik untuk memilih tujuan yang akan di ambil serta bagaimana tujuan tersebut berjalan sesuai dengan mestinya.

Post, et al (1999) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial. Dari beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik, Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, kesempurnaan, dan kelanjutan.

Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat dan tujuan, dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Ide

kebijakan di atas melibatkan apa yang disebut Easton sebagai alokasi nilai-nilai (*the allocation of values*) dan memiliki konsekuensi distribusional.

Ranson and Steward dalam buku Greer and Paul Hoggett (1999) kebijakan dalam arti khusus, berkaitan dengan ruang publik. Kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan privat individu atau kelompok. Domain publik yang mewarnai kebijakan publik memiliki peran esensial dalam mengklarifikasi, menyatakan, dan mewujudkan tujuan-tujuan publik, yang juga menjadi tujuan para individu atau kelompok secara keseluruhan.

2.3 Advokasi Kebijakan

Advokasi Kebijakan Valerie Miller dan Jane Covey (2005) menjelaskan advokasi merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh kelompok masyarakat, dimana mereka memiliki akses yang terbatas terhadap sumber-sumber kekuasaan tersebut. Untuk mengefektifkan advokasi kebijakan, Miller dan Covey mengemukakan beberapa faktor penting yaitu: legitimasi, kredibilitas, pertanggung jawaban dan kekuasaan.

1. Legitimasi

Merupakan hubungan antara pemimpin dan yang di pimpin. Dalam usaha advokasi legitimasi faktor yang paling penting di dalam organisasi supaya di dengarkan oleh masyarakat maupun para pemegang kekuasaan. Legitimasi menunjuk ada siapa yang di wakili oleh organisasi itu dan dengan otoritas apa perwakilan itu berbicara.

2. Kredibilitas

Merupakan sebuah organisasi yang menunjuk pada seberapa jauh organisasi itu di percayai sebagai sebuah informasi yang akurat. Diman

menunjuk pada hubungan organisasi dengan konstituennya dan seberapa jauh organisasi memiliki pertanggung jawaban kepada konstituennya atau kelompok kliennya.

3. Pertanggung jawaban

Dalam advokasi konteksnya yaitu mekanisme pertanggung jawaban tim advokasi kepada anggota yang diwakilinya. Dimana di sini di lihat dari bagaimana pihak organisasi menerapkan konsep-konsep pertanggung jawaban yang mempengaruhi kemungkinan mereka untuk berhasil khususnya di bidang advokasi kebijakan pada pendidikan politik masyarakat.

4. Kekuasaan

Kekuasaan disini ditekankan pada sumber-sumber kekuasaan apa yang dimiliki untuk dapat mempengaruhi kebijakan.

2.4 Program

Menurut Hans Hochholzer (2012) Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat agar mencapai sebuah tujuan dan sarana yang ditetapkan di dalam suatu program yang disusun berdasarkan tujuan ataupun target yang ingin dicapai.

Menurut Santosa (2011) Program kerja merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersusun yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi sebagai suatu pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi dan digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Menurut E Hetzer (2012) program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam sebuah organisasi dalam bentuk petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaan di dalam sebuah aktivitas yang biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, dalam pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu untuk menjalankan sebuah program yang telah di buat.

2.5 Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik modern, yang bersendikan perwakilan politik. Negara modern, yang tidak mungkin lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi Sosial dari Negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga Negara sebagai pemilik Negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang pengertian partai politik yang berbunyi Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Neumann dalam buku Farhan Ahmad Hamdi (2008) partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, dan kelompok-kelompok lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah partai politik merupakan perantara yang besar dengan menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga Pemerintahan yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

2.5.1 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik dapat di artikan dengan komponen penting di dalam suatu sistem politik yang di gunakan sebagai alat atau wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Negara Demokrasi yang di bentuk dalam suatu pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya di dalam Negara agar menjadi masyarakat yang sadar akan Hak dan kewajibannya dalam Bangsa dan Bernegara.

Fungsi partai politik secara normatif di sebutkan pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang fungsi partai politik sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Almond, ada delapan fungsi struktur politik, di antaranya yaitu :

1. Sosialisasi politik dimana pada sosialisasi politik ini merupakan fungsi yang mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, umumnya atau bagian dari penduduk, melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, yudisial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, lembaga sosial keagamaan dan berbagai struktur politik, serta kontak-kontak politik langsung.
2. Rekrutmen politik dimana pada rekrutmen politik ini merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi menjadi anggota organisasi yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Dimana pada fungsi ini di jalankan melalui pemunculan tokoh partai untuk jabatan publik dalam sistem otoriter
3. Komunikasi politik merupakan fungsi jalan, mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui struktur yang ada dalam sistem politik

yang di jalankan oleh partai politik bersama struktur politik lainnya, melalui komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

4. Artikulasi kepentingan pada artikulasi kepentingan dimana partai politik ini melaksanakan fungsinya melalui kepentingan dengan membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah sebelum kebijakan-kebijakan itu dapat di tentukan di dalam suatu individu maupun kelompok pada masyarakat dengan menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, apa yang mereka ingin dapatkan dari politik.
5. Agregasi kepentingan dimana pada fungsi ini agregasi kepentingan
6. Pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, atau calon presidennya memenangkan pemilihan umum.
7. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan.
8. Penghakiman kebijakan pada fungsi ini partai politik hanya melakukan pengawasan sebagai bagian dari menyalurkan kepentingannya dan tuntutan masyarakat yang nantinya di gabungkan menjadi sebuah alternatif kebijakan yang di jalankan Partai Politik dengan menggabungkan tuntutan dari kelompok masyarakat yang berbeda menjadi alternatif kebijakan.
9. Pembuatan kebijakan fungsi ini di jalankan apabila partai menjadi kontrol sosial. Dimana penerapan kebijakan ini di laksanakan oleh pejabat publik atau orang partai yang bekerja berdasarkan prinsip amanah serta *clear and good government*.

2.5.2 Tipe Partai Politik

Micridis membagi beberapa partai politik dalam tipe partai politik, segi internal partai politik, dan fungsi partai politik

1. Tipe partai politik

1. Partai komprehensif, yaitu partai politik yang berorientasi pada pengikut, partai yang berusaha mendapatkan suara paling terbanyak dari suara-suara lainnya.
2. Partai sektarian, partai yang memegang kelas, wilayah, daerah, atau ideologi sebagai daya tariknya.

2. Segi partai politik

1. Partai tertutup, partai dengan keanggotaan terbatas atau partai mengenakan kekuatan yang ketat untuk keanggotaannya yang cenderung otoriter, dimana anggota di harapkan mengikuti keputusan yang di buat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap prosedur pertimbangan yang terbuka dan juga cenderung menekankan aksi langsung dan di arahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintahan.
2. Partai terbuka, partai yang memperbolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan yang sifatnya dari kebalikan sifat tertutup, dengan menekankan pada aksi politik dan menghormati pluralisme politik.

3. Fungsi partai politik

1. *Diffusend party* (partai menyebar), dimana pada *diffusend party* ini sangat menekankan integrasi pengawasan permanen dan total, serta

mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenai cara bertindak, partai yang menyebar menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa.

2. *Specialized party* (partai terspesialisasi), dimana pada *specialized party* ini sangat membatasi tipe aksinya ada prosedur-prosedur yang dapat di terima. Partai ini sangat menekankan representasi, agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi, serta kontrol terhadap pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu.

2.6 Definisi Pendidikan Politik

Pendidikan politik secara *etimologis*, pendidikan berasal dari kata latin, *educere* yang berarti melatih. Dalam sebuah lapangan pertanian pendidikan dikenal kata *educere*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti di atas tentu kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan ialah suatu proses yang membantu, menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan.

Khan (2010) menyatakan bahwa pendidikan ialah suatu proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia yang nantinya dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Dictionary of Education dalam buku Mahfud (2009) mengartikan bahwa pendidikan sebagai proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku di dalam masyarakat di mana dia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih

dan terkontrol, sehingga iya memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.

Mahfud (2009) menjelaskan kaitan antara pendidikan dan politik dapat terwujud dalam bentuk yang berbeda, sesuai karakteristik dan persiapan masyarakat yang bersangkutan. Bentuk hubungan berbeda antara satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat primitif yang didasarkan pada basis kesukuan, orang tua dari suatu suku biasanya memainkan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pemimpin politik dan seorang pendidik. Mereka mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajari mereka teknik berburu, mencari ikan, dan berperang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 tentang pengertian pendidikan politik yang berbunyi Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kartono (1999) pendidikan politik merupakan suatu pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politik dari setiap permasalahan dengan pemahaman politik maupun pemahaman konflik. Banyaknya konflik di dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karna itu di masyarakat sering muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik. Pendidikan politik dilaksanakan untuk mempersiapkan kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik,

mendapatkan penyelesaian konflik, sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan.

2.6.1 Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik di sini bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya memahami pendidikan politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk membangun politik yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara.

Seperti yang di kemukakan oleh Soeharto (2011), dimana tujuan pendidikan politik merupakan bentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik yang terdapat pada diri warga Negara.

Kartono (1989) menyatakan bahwa pendidikan politik memiliki dua tujuan pendidikan politik, yaitu :

1. Membuat masyarakat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik serta berani memberikan kritik dengan membangun kondisi masyarakat yang tidak baik menjadi baik yang dimana aktivitasnya diarahkan pada proses Demokrasi sejati dan sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan peranan kemanusiaan dari setiap individu sebagai warganegara dengan mengembangkan semua bakat dan kemampuannya di dalam pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan agar dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan Bangsa dan Negara.

Tujuan Pelaksanaan Pendidikan Politik secara normatif di sebutkan pada Pasal 31 Undang-Undang Partai Politik menjelaskan :

1. Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter Bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

2.6.2 Fungsi Pendidikan Politik

Pendidikan politik berfungsi untuk mengubah atau membentuk tata laku pribadi individu yang membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik guna untuk memperbaiki dan memperkuat pemahaman masyarakat dalam penerapan pada pendidikan politik.

Nasrullah dan Amril (2004), mengemukakan fungsi atau tujuan pendidikan politik yang meliputi :

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti saling berkerja sama, bersikap toleran, loyal terhadap Bangsa dan Negara, bersikap sportif demi kesejahteraan hidup bersama.

2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, yang beretika politik dan tanggung jawab politik, agar dapat menjadi insan politik terpuji.
3. Memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya dengan memiliki kesadaran bahwa urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak utuh atau melekat sifatnya, tetapi selalu bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang actual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya.
5. Mampu berpartisipasi dalam politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses politik dari warga Negara dan pertanggung jawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera, permanen, dan melekat sifatnya, tetapi selalu bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
6. Berpartisipasi dalam politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga Negara dan pertanggung

jawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat menginovasi teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Oleh karena itu peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai suatu referensi dalam memperkaya bahan serta kajian pada penelitian peneliti. Berikut ini peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian, judul dan tahun peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang	Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang
1	Musdah Erwin, 2013 dengan judul Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman.	Hasil penelitin ini masi memiliki banyak kekurangan dimana organisasi pengusaha yang diwakili Apindo tidak banyak melakukan aksi advokasi. Advokasi hanya dilakukan melalui negosiasi dalam	Penelitian terdahulu memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum	Pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan dengan menggunakan metode

		sidang dewan pengupahan dan lobi dengan serikat pekerja dan pemerintah diluar sidang pengupahan di tingkat Kabupaten.	Kabupaten Sleman Tahun 2013 sedangkan penulis sekarang lebih berfokus pada kebijakan partai politik amanat nasional kabupaten langkat dalam melakukan advokasi pendidikan politik masyarakat.	deskriptif pendekatan kualitatif dan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara dan pengambilan data.
2	Adiwidjaja Ignatius dan Dody Setyawan 2016 Kebijakan Partai Politik Dan Strategi Komunikasi Untuk Memikat Pemilihan Pemula Pada Pilkada Kabupaten Malang	Hasil penelitian ini dimana partai beserta kandidat Bupati/Wakil Bupati ke tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi komunikasi secara intensif menggunakan media atau alat bantu, seperti: kartu nama, stiker, spanduk dan baliho. Agar semua Warga Kabupaten Malang mengenal dan mengetahui secara mendalam figur - figur Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati yang akan berkompetisi di panggung politik Kabupaten Malang.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemilihan pemula yang baru awal memiliki ktp sedangkan penulis sekarang lebih berfokus pada keseluruhan masyarakat dari yang pemula hingga yang sudah lama melakukan pemilihan	Pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara dan pengambilan data.
3	Junaidi Dadi Iskandar, 2014 dengan judul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Advokasi	Penelitian terdahulu berfokus pada suatu kebijakan	Pesamaan penelitian terdahulu dengan

	<p>Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergulatan Politik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh kiprah perempuan dalam kehidupan politik di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.</p>	<p>keterwakilan 30% perempuan dalam politik di lembaga legislatif merupakan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh interest group yang concern memajukan peran politik perempuan untuk mempengaruhi atau mendukung sumber daya politik yang berkaitan dengan kebijakan publik dengan cara menekan implementasi dari regulasi atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.</p>	<p>advokasi peningkatan representasi perempuan di dalam pergulatan politik sedangkan penulis sekarang lebih berfokus pada kebijakan partai dalam advokasi pendidikan politik masyarakat.</p>	<p>penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan teknik observasi, dokumentasi serta wawancara dan pengambilan data.</p>
--	---	---	--	--

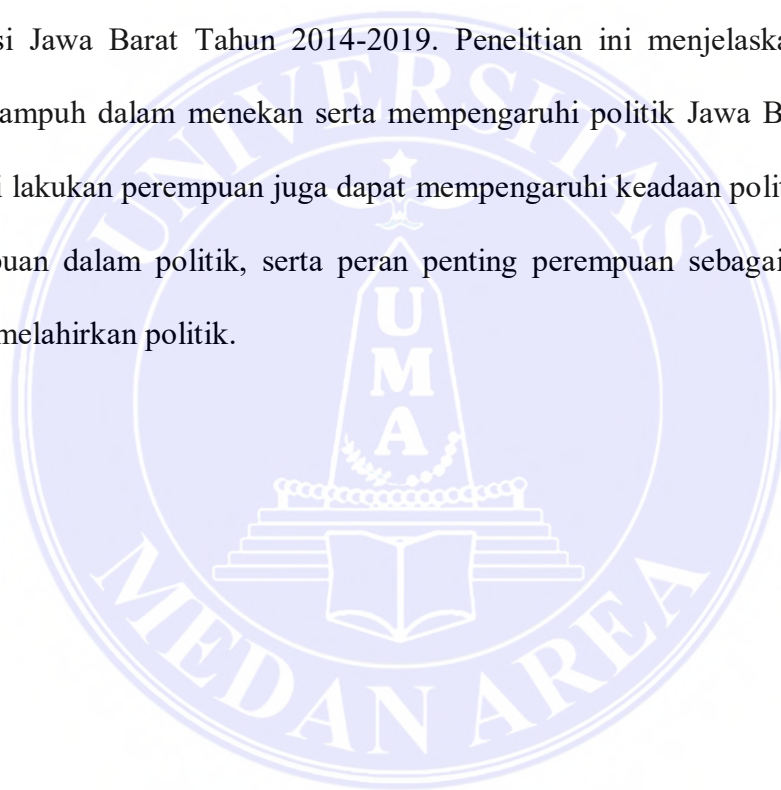
Sumber : Tabel diolah peneliti 2022

Penelitian yang diteliti oleh Musdah Erwin yang berjudul Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah, yang dilakukan oleh sekelompok pekerja atau organisasi serikat buruh, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah serta mendapatkan upah yang layak bagi pekerja di Kabupaten Sleman.

Penelitian yang diteliti oleh Adiwidjaja Ignatius dan Setyawan yang berjudul Kebijakan Partai Politik dan Strategi Komonikasi untuk Memikat Pemilih Pemula di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula (awal) dalam menentukan

pilihanya, serta menjelaskan strategi apa yang bagus di gunakan untuk melakukan kebijakan tersebut, strategi itu dapat berjalan dengan lancar, tujuanya tidak lain hanya untuk mendapat dukungan dari pemilih pemula (awal), sehingga dengan dukungannya paslo yang di usung partai politik bisa menang dalam pemilihan tersebut.

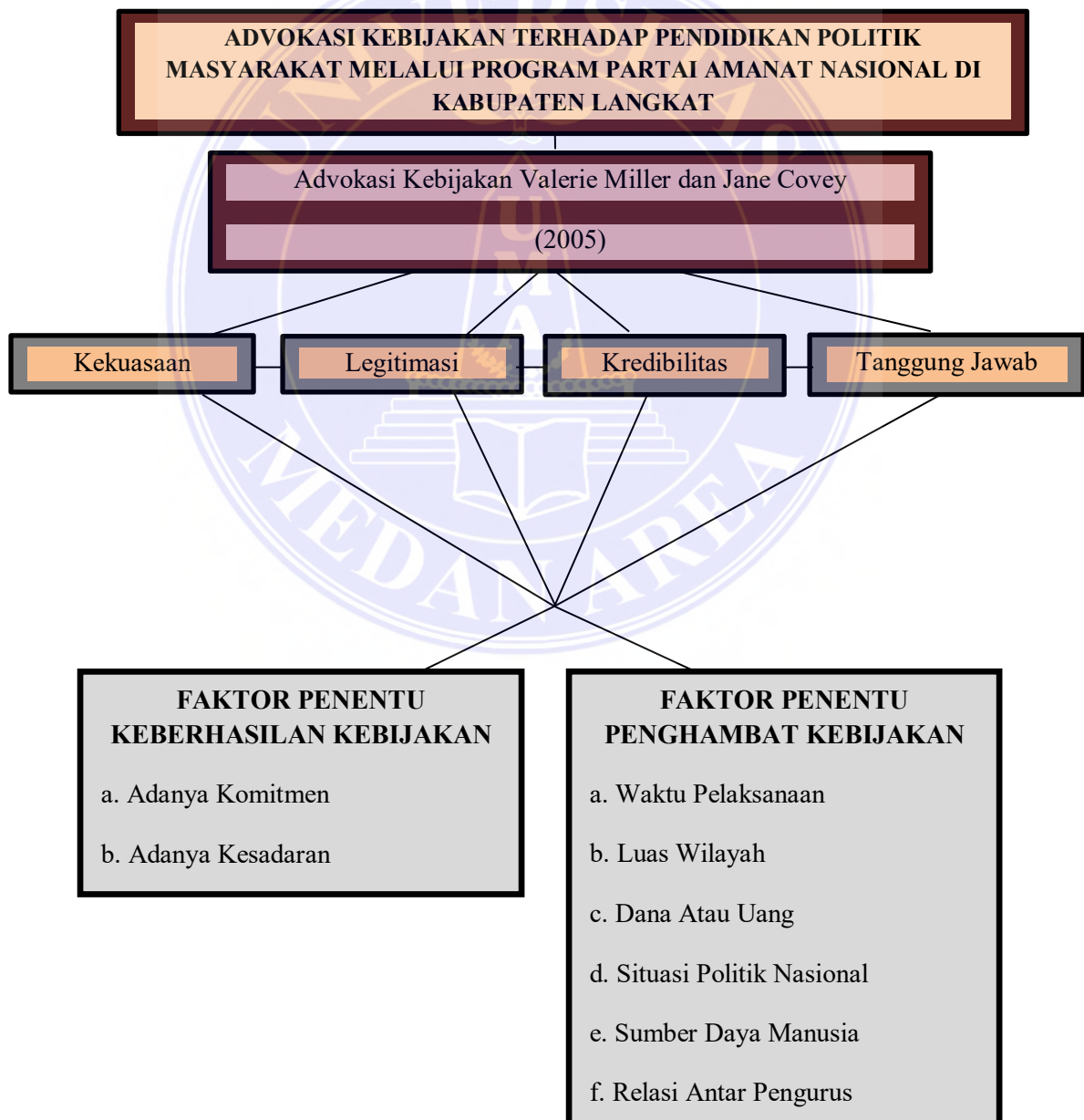
Penelitian yang diteliti oleh Junaidi Dadi Iskandar dengan judul Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergaulan Politik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019. Penelitian ini menjelaskan perempuan juga mampu dalam menekan serta mempengaruhi politik Jawa Barat, advokasi yang di lakukan perempuan juga dapat mempengaruhi keadaan politik, kesetaraan perempuan dalam politik, serta peran penting perempuan sebagai tokoh utama dalam melahirkan politik.



2.8 Kerangka Pemikiran

Pada penyusunan penelitian harus berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar kerangka pemikiran penulisan ini adalah Advokasi Kebijakan Terhadap Pendidikan Politik Masyarakat Melalui Program Partai Amanat Nasional di Kabupaten Langkat (studi kasus pada DPD partai amanat nasional Kabupaten Langkat).

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Politik Amanat Nasional di Kabupaten Langkat merupakan suatu langkah baik pada partai politik untuk dapat memberikan pengaruh atas kebijakan yang telah ada atau akan dibuat di Kabupaten Langkat. Sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki Partai Politik Amanat Nasional dapat memberikan dampak yang baik terhadap kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat itu sendiri.

Legitimasi yang dibuat Partai Politik Amanat Nasional diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Kedepannya masyarakat mampu memahami, hak, dan kewajiban, bagaimana pentingnya pendidikan politik itu buat dirinya sendiri.

Kredibilitas masyarakat Kabupaten Langkat pada Partai Politik Amanat Nasional, dalam kekuasaan serta legitimasi terhadap advokasi pendidikan politik terhadap masyarakat. Telah memberikan dampak baik dalam segi berpolitik, baik itu bagi Partai Politik Amanat Nasional maupun bagi masyarakat langkat itu sendiri.

Partai Politik Amanat Nasional memiliki tanggung jawab besar terhadap kekuasaan, legitimasi, dan kredibilitas, yang telah di berikan masyarakat kepada partai. Partai harus mampu mempertanggung jawabkan itu semua, sehingga advokasi pendidikan politik masyarakat itu tidak sia-sia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ialah proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis yang nantinya peneliti dapat menemukan teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya.

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulis mencoba untuk mengelolah data yang diperoleh dari Kebijakan Partai Amanat Nasional terhadap advokasi pendidikan politik masyarakat Kabupaten Langkat. Penelitian kualitatif metode yang paling efektif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dikarenakan metode kualitatif merupakan metode yang melakukan pengamatan secara mendalam serta mendetail dengan semua sumber data yang ditemukan, sehingga dapat sangat membantu jalannya penelitian ini. Artinya semakin dalam dan lengkap data maka semakin tinggi kualitas penelitiannya

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan data secara nyata dan benar tentang apa yang sebenarnya ada di lapangan. Dengan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini sekiranya bertujuan untuk mengelola lebih dalam tentang Kebijakan Partai Politik Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam advokasi pendidikan politik masyarakat pada dewan pimpinan cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat, yang beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 63 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Agar mendapatkan data yang aktual maka peneliti membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian di Kabupaten Langkat mulai sejak judul Skripsi ini disetujui. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul-Agst 2023
1	Penyusunan Proposal										
2	Seminar Proposal										
3	Revisi Proposal										
4	Pelaksanaan Penelitian										
5	Seminar Hasil										
6	Revisi Skripsi										
7	Sidang Meja Hijau										

Sumber : Diolah oleh peneliti

3.3 Informan Penelitian

Afrizal (2016) informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain didalam suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti serta pewawancara secara mendalam. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapny dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian merupakan peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi.

Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Infoman Kunci

Informan kunci merupakan informan yang memiliki pengaruh sangat penting dan dipercaya yang nantinya dapat memberikan informasi. Menurut Afrizal (2016) informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Langkat atau Sekertaris DPD Partai Amanat Nasional Langkat.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung, yaitu informan yang terlibat langsung dalam interaksi sebagai pelengkap analisis sosial yang nantinya dapat memberkan penjelasan mengenai topik yang diteliti dari secara teknik maupun informasi detail permasalahan. Yang menjadi informan pendukung pada penelitian ini ialah masyarakat Kabupaten Langkat.

3. Informan Penambah atau Tambahan

Informan penambah ialah mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan penambah pada penelitian ini ialah akademisi.

Tabel 3.2

Informan Penelitian

NO	Informan Peneliti	Jumlah	Keterangan	Klarifikasi Informan
1	Ketua Partai Amanat Nasional (Bapak Ir Antoni Ginting)	1	Ketua partai politik amanat nasional merupakan orang yang memiliki kekuasaan di dalam partai, sekaligus orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat suatu kebijakan partai, sehingga peneliti beranggapan ketua partai politik amanat nasional merupakan informasi penting untuk peneliti, Informasi yang peneliti ambil dari ketua partai politik amanat nasional ialah informasi yang berkaitan dengan judul peneliti, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan jelas tentang apa yang akan penulis teliti.	Informan Kunci
2	Sekretaris dan kader-Kader Partai Amanat Nasional (Bapak surkani SE.MM dan Ibu Sulastri)	2	Sekretaris dan kader partai politik amanat nasional, sebagai kader atau anggota partai politik, peneliti beranggapan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan partai, sehingga peneliti bisa mempertanyakan keperluan peneliti terhadap kader partai tersebut, sehingga informasi tersebut bisa menambah pengetahuan penulis, tentang apa yang penulis perlukan dalam penelitian.	Informan Pendukung

3	Masyarakat (Ibuk Siti Halimah)	1	Masyarakat sebagai penerima kebijakan yang di berikan partai amanat nasional serta sebagai pertimbangan atas kebijakan yang di keluarkan partai amanat nasional apakah sesuai atau tidak untuk masyarakat. Penulis memasukan masyarakat sebagai perbandingan informasi yang penulis dapatkan dari ketua partai, dan kader partai, tentang apa yang penulis teliti. Informasi yang penulis ambil dari masyarakat ialah informasi yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga penulis tetap fokus dengan apa yang akan penulis teliti.	Informan Tambahan
4	Akademisi (Bapak Rezi Supriadi S.H)	1	Akademisi sebagai pembanding bagaimana kebijakan dari partai amanat nasional berjalan di masyarakat terhadap kebijakan yang di keluarkan. Penulis memasukan akademisi sebagai pertimbangan penulis untuk mengetahui apakah Informasi yang penulis dapatkan di partai politik amanat nasional, benar sesuai tujuan dan tugas partai politik, dan melihat tanggapan seorang akademisi terhadap apa yang penulis ketahui di partai tersebut, serta bagaimana akademisi memberikan masukan terhadap partai politik	Informan Tambahan
	JUMLAH	5		

Sumber : diolah peneliti 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif di karenakan tujuan paling utama dari penelitian yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4 macam, yaitu observasi , wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Adapun teknik- teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data secara langsung yang mempunyai ciri spesifik jika di bandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner, untuk dapat informasi yang peneliti butuhkan seperti wawancara dan kuisioner maka peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu ke kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat.

2. Wawancara

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti. Wawancara yang di lakukan pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur dimana pada wawancara terstruktur ini setiap responden di beri pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatifif jawabannya pun telah di siapkan, selain menyiapkan instrument sebagai pedoman untuk wawancara.

Pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Maka dari itu informasi akan didapatkan melalui orang – orang yang akan diwawancarai langsung yaitu: Ketua Partai Amanat Nasional, dua orang Kader Partai Amanat Nasional, dua orang masyarakat sebagai penerima Kebijakan yang di keluarkan oleh Partai Amanat Nasional, dan akademisi sebagai pembanding bagaimana kebijakan Partai Amanat Nasional berjalan di masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa yang sudah berlalu dimana biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan biasanya berbentuk catata harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar biasanya berbentuk foto, gambar hidup. Dokumen yang berbentuk karya biasanya berbentuk karya seni seperti patung, dan film. Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara di dalam metode penelitian kualitatif.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti menilai data yang sekaligus menguji

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama

3.5 Teknik Analisis Data

Komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat sebagai berikut :

Peneliti menggunakan metode analisis yang kedua yaitu model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Sugiyono (2006) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Dimana proses reduksi ini biasanya peneliti

merangkum hasil catatan lapangan, selama proses penelitian berlangsung yang tadinya masih tidak teratur di ubah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dengan mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto proses pembelajaran. Selain itu di dalam proses reduksi peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana yang berkaitan dengan fokus dan masalah.

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau *Verification*

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Verification* ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data, observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan mengenai Kebijakan Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam Melakukan Advokasi Pendidikan Politik Masyarakat maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Program Kerja Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat dalam kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat, suatu proses yang dilakukan Partai untuk melaksanakan kegiatan partai dalam melakukan pendidikan politik, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengetahui hak dan kewajiban dalam pemilihan. Berdasarkan teori advokasi Kebijakan Valerie Miller dan Jane Covey (2005) yang saya gunakan, yaitu :

Pada indikator kekuasaan yang dimiliki Partai Amanat Nasional dalam melaksanakan program kerja pendidikan politik masyarakat dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, reses bersama DPRD, dan Mabita "Masa Bimbingan Anggota" telah dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional sesuai prosedur kegiatan yang dibuat partai. Kekuasaan yang dimiliki partai mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program kerja sesuai prosedur yang telah dituliskan.

Pada indikator legitimasi atau pengakuan masyarakat Partai Amanat Nasional melaksanakan kegiatan program kerja, dimana program

kerja yang dilakukan Partai Amanat Nasional yang meliputi pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik dengan membuat E-KTA, reses bersama DPRD, serta melaksanakan MABITA (masa bimbingan anggota) merupakan suatu bentuk kewajiban partai politik terhadap masyarakat.

Pada indikator kredibilitas Partai Amanat Nasional mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja partai, dimana kegiatan tersebut mendapat dana atau uang dari pemerintah daerah, serta berjalanya kegiatan tersebut dengan lancar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Pada indikator pertanggung jawaban Partai Amanat Nasional telah melakukan program kerja pendidikan politik terhadap masyarakat, dimana ada bukti tertulis yang dilaksanakan partai politik, dengan ada bukti tersebut Partai Amanat Nasional telah menjalankan tugas fungsi partai sebagai tempat pendidikan politik

2. Faktor penentu keberhasilan program kebijakan dan faktor penghambat program kebijakan Partai Amanat Nasional dalam advokasi kebijakan pendidikan politik terhadap masyarakat, merupakan suatu program yang dibuat oleh partai sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Adapun keberhasilan program kebijakan advokasi pendidikan politik Partai Amanat Nasional yaitu tamu kader, meningkatnya pengetahuan masyarakat pentingnya politik. Sedangkan faktor yang menghambat program kebijakan advokasi pendidikan politik, kurangnya waktu pendidikan politik, kurangnya dana

partai politik dalam melakukan pendidikan, serta wilayah yang luas dan transportasi yang kurang memadai.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan diatas, peneliti telah melakukan penggabungan data dan mengklasifikasikan data. Peneliti juga memberikan berupa masukan penyelesaian masalah dengan memberikan saran kepada Partai amanat Nasional Dalam Melakukan Pendidikan Politik Masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bentuk saran tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Advokasi Pendidikan Politik harus memanfaatkan Hak dan Fungsi Partai Politik sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Sebagai landasan untuk melaksanakan pendidikan politik, sosialisasi politik kepada masyarakat. Partai Amanat Nasional harus mengoptimalkan kebijak politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat setiap tahunnya, dengan demikian masyarakat dapat paham bagaimana hak dan kewajiban mereka untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu, serta Partai Amanat Nasional akan mendapat percaya dari masyarakat Kabupaten Langkat.
2. Partai Amanat Nasional terhadap advokasi kebijakan harus memaksimalkan kader-kader partai dalam melakukan pendidikan politik, memaksimalkan dana yang di dapat oleh Partai Amanat Nasional dalam menjalankan advokasi kebijakan serta memaksimalkan kegiatan yang di

lakukan partai untuk melaksanakan pendidikan politik di masyarakat baik waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan pendidikan politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amal, Siti Hidayati. "Penelitian yang Berperspektif Perempuan", T.O. Ihromi (Penyunting), 1995, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Abdullah, Idi & Safarina. (2011), *Sosiologi pendidikan individu, masyarakat, dan pendidikan*. Depok : Rajawali Pers. Pt. Raja Grafindo Persada Depok
- Edi, Suharto. (2014), *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta Bandung
- Handoyo, Eko&Lestari, Puji. (2017), *Pendidikan Politik*. Yogyakarta. Pohon Cahaya (UNNES)
- Hamid, Farhan, Ahmad. (2008), *Partai Politik Lokal di Aceh*. Kemitraan partnership
- Henry, Subiakto&Rachmah, Ida. (2014), *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*, Jakarta : jl. Tandra Raya Prenadamedia Group
- Imran Asbar, S.H (2020) *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres v di Kota Kendari Sulawesi Tenggara*
- Mahardhani, Januar Ardhana. (2018), *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media
- Mirian, Budiardjo. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. Pt Gramedia Pustaka Utama
- Nurhasim Moch (2016) *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, Jakarta, LIPI (Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia)
- Riwanto, Agus. (2016), *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta. Thafa Media
- Ridha, Muhammad Suaib. (2016), *Pengantar kebijakan publik*. Calpulis
- Ramlan, Subakti. (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sugiyono.(2017), *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sinaga, Salam Rudi. (2013), *Pengantar ilmu politik*. Yogyakarta : Graha ilmu

Setiadi, M Elly&Koip, Usman. (2013), *Penghantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Panadamedia Group

Valerie, Millerand Jane, Covey. (2005), *Pedoman Advokasi Perencanaan,Tindakan,dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

B. Jurnal

Erwin, Musdah. (2013) Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman, Government: Ilmu Pemerintahan, Vol.6 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Di akses pada tanggal 28 oktober 2022. Pukul 14.14)

Hadi Roman Saputro (2021) Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fkultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka (Di akses pada tanggal 28 oktober 2022. Pukul 14.14)

Ignatius, Adiwidjaja dan Dodi, Setyawan. (2016) Kebijakan Partai Politik Dan Strategi Komunikasi Untuk Memikat Pemilihan Pemula Pada Pilkada Kabupaten Malang, Vol 6, no. 1, 2016, Program Studi Adminitrasi Negara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (Di akses pada taggal 28 oktober 2022. Pukul 11.26)

Iskandar, Junaedi Dadi. (2014) Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Pergulatan Politik Provinsi Jawa Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Bagasasi Bandung (Di akses pada tanggal 27 oktober 2022. Pukul 20.21)

Nasution, Suhardi. & Kusmanto, H. (2019) Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2):344-354. (Di akses pada tanggal 27 oktober 2022. Pukul 20.21)

Noor Firmansyah (2020) Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan (Di akses pada tanggal 27 oktober 2022. Pukul 20.21)

Satrio wahuaji (2018) Menggagas Muatan Pendidikan Politik Yang Ideal (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Wonogiri, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum (Di akses pada tanggal 28 oktober 2022)

Suhardi,Arif,Heri (2019) Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, Medan, Universitas Suamtra Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Magester Ilmu Politik (Di kses tanggal 7 agustus 2023)

Suryani Putu,Wijaya Gede, Ayu Ida (2020) Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat, Denpasar Bali, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Di akses tanggal 7 agustus 2023)

C. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

D. Internet

<https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu002.pdf> (Di akses pada tanggal 22 september 2022. Pukul 20.38)



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Kebijakan Partai Politik Amanat Nasional Kabupaten Langkat Dalam

Melakukan Advokasi Pendidikan Politik Masyarakat

(Studi Kasus Pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional

Kabupaten Langkat)

Penelitian ini menggunakan teori Valerie Miller dan Jane Covey (2005) yang menjelaskan bahwa indikator advokasi kebijakan terbagi atas empat yaitu :

1. Legitimasi

Merupakan hubungan antara pemimpin dan yang di pimpin. Dalam usaha advokasi legitimasi faktor yang paling penting di dalam organisasi supaya di dengarkan oleh masyarakat maupun para pemegang kekuasaan. Legitimasi menunjuk ada siapa yang di wakili oleh organisasi itu dan dengan otoritas apa perwakilan itu berbicara. Legitimasi yang dibuat partai politik amanat nasional diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat kabupaten langkat. Kedepanya masyarakat mampu memahami, hak, dan kewajiban, bagaimana pentingnya pendidikan politik itu buat dirinya sendiri.

2. Kredibilitas

Merupakan sebuah organisasi yang menunjuk pada seberapa jauh organisasi itu di percayai sebagai sebuah informasi yang akurat. Diman menunjuk pada hubungan organisasi dengan konstituennya dan seberapa jauh organisasi memiliki pertanggung jawaban kepada konstituennya atau kelompok

kliennya. Kredibilitas masyarakat kabupaten langkat pada partai politik amanat nasional, dalam kekuasaan serta legitimasi terhadap advokasi pendidikan politik terhadap masyarakat. Telah memberikan dampak baik dalam segi berpolitik, baik itu bagi partai politik amanat nasional maupun bagi masyarakat langkat itu sendiri.

3. Pertanggung jawaban

Dalam advokasi konteksnya yaitu mekanisme pertanggung jawaban tim advokasi kepada anggota yang diwakilinya. Dimana di sini di lihat dari bagaimana pihak organisasi menerapkan konsep-konsep pertanggung jawaban yang mempengaruhi kemungkinan mereka untuk berhasil khususnya di bidang advokasi kebijakan pada pendidikan politik masyarakat. Partai politik amanat nasional memiliki tanggung jawab besar terhadap kekuasaan, legitimasi, dan kredibilitas, yang telah di berikan masyarakat kepada partai. Partai harus mampu mempertanggung jawabkan itu semua, sehingga advokasi pendidikan politik masyarakat itu tidak sia-sia.

4. Kekuasaan

Kekuasaan disini ditekankan pada sumber-sumber kekuasaan apa yang dimiliki untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik amanat nasional di kabupaten langkat merupakan suatu langkah baik pada partai politik untuk dapat memberikan pengaruh atas kebijakan yang telah ada atau akan dibuat di kabupaten langkat. Sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki partai politik amanat nasional dapat memberikan dampak yang baik terhadap kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat itu sendiri.

Pedoman Wawancara : 1

Ketua Partai Amanat Nasional

1. Apa bentuk kebijakan partai politik amanat nasional dalam advokasi pendidikan politik masyarakat?
2. Apa kendala yang di hadapi partai politik amanat nasional selama melakukan advokasi pendidikan politik masyarakat?
3. Apa upaya partai politik amanat nasional dalam meningkatkan advokasi pendidikan politik masyarakat?
4. Apa ada daerah yang di targetkan oleh partai politik amanat nasional dalam advokasi pendidikan politik masyarakat?
5. Apa yang di harapkan oleh partai politik amanat nasional kepada masyarakat setelah melaksanakan advokasi pendidikan politik?

Pedoman Wawancara : 2

Kader-Kader Partai Amanat Nasional

1. Apa ada kebijakan partai politik amanat nasional dalam advokasi pendidikan politik?
2. Bagaimana pelaksanaan advokasi pendidikan politik yang di lakukan oleh partai politik amanat nasional?
3. Apa ada kader partai politik amanat nasional di libatkan dalam pendidikan advokasi pendidikan politik?
4. Bagaimana peran kader partai politik amanat nasional dalam advokasi pendidikan politik?
5. Apa harapan dari kader partai politik amanat nasional kedepannya terhadap advokasi pendidikan politik?
6. Apa respon masyarkat terhadap advokasi pendidikan politik yang di selenggarakan oleh partai politik amanat nasional?

Pedoman Wawancara : 3

Masyarakat Kabupaten Langkat

1. Apa ada advokasi pendidikan politik di lakukan partai politik amanat nasional?
2. Apa harapan bapak terhadap advokasi pendidikan politik yang dibuat partai politik amanat nasional?
3. Bagaimana tanggapan bapak atas advokasi pendidikan politik?
4. Apa advokasi pendidikan politik ini melibatkan seluruh masyarkat?
5. Apa bapak setuju dengan advokasi pendidikan politik yang di lakukan partai politik amanat nasional?

Pedoman Wawancara : 4

Akademisi

1. Apa tanggapan dan pandangan bapak terhadap kebijakan partai politik amanat nasional dalam advokasi pendidikan politik masyarakat?
2. Apa menurut bapak kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat yang dilakukan partai amanat nasional ini telah sesuai dengan fungsi partai politik?
3. Apa menurut bapak adakah kekurangan dalam advokasi pendidikan politik ini?
4. Menurut bapak apa yang harus dilakukan partai politik amanat nasional supaya kebijakan advokasi pendidikan politik masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar?

Lampiran 2 :

Jawaban Wawancara

Jawaban Ketua Partai Amanat Nasional

1. Kami membentuk kepengurusan di setiap tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
2. Pelaksanaan berjalan dengan baik.
3. Memberikan sosialisasi serta melakukan masa bimbingan anggota pada saat pengkaderan dan memberikan arahan kepada kader kami untuk bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
4. Tidak
5. Kami berharap masyarakat bisa paham dan mengerti atas hak dan kewajibannya serta melek kepada politik di Kabupaten Langkat.

Jawaban Kader Partai Amanat Nasional

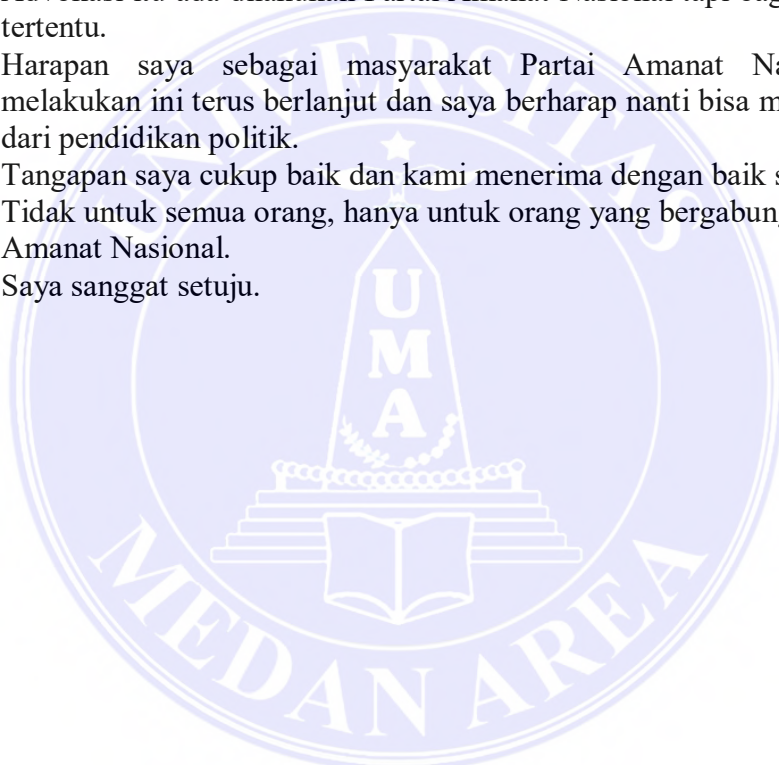
1. Kebijakan yang dilakukan Partai Amanat Nasional itu ada kami lakukan.
2. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional telah berjalan walau ada hambatan-hambatan yang kami dapat dalam pelaksanaan itu.
3. Kami selalu dilibatkan, karena kami yang sebenarnya di harapkan Partai untuk melakukan itu semua.
4. Peran kami sebagai kader ya, apa yang di bilang oleh ketua kami dalam masa bimbingan anggota (mabita)
5. Harapan kami sebagai kader, supaya masyarakat ini paham akan hak dan kewajiban ya, trus akan ada peningkatan nanti ketika ada pemilihan di Kabupaten Langkat.
6. Respon masyarakat beragam sih, tapi kami sebagai kader yang paham politik harus menyabut semua respon ini dengan baik.

Jawaban Akademisi

1. Sebagai akademisi menyabut dengan baik apa yang di lakukan Partai Amanat Nasional, kerna itu tugas partai dalam melakukannya
2. Jika dilihat dari apa yang didapat di lapangan maka dapat di bilang partai telah berusaha dengan baik wajib di beri aspirasi, walau belum sepenuhnya dikatakan bagus.
3. Dilihat kekuranganya telah di bilang sama ketua Partai, mungkin disana harus ada ide barau supaya pendidikan ini dapat berjalan dengan baik.
4. Menurut saya sendiri Partai Amanat Nasional harus sering melakukan sosialisasi serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Jawaban Masyarakat

1. Advokasi itu ada dilakukan Partai Amanat Nasional tapi bagi masyaraakat tertentu.
2. Harapan saya sebagai masyarakat Partai Amanat Nasional harus melakukan ini terus berlanjut dan saya berharap nanti bisa medapat mafaat dari pendidikan politik.
3. Tangapan saya cukup baik dan kami menerima dengan baik soal ini
4. Tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang bergabung dalam Partai Amanat Nasional.
5. Saya sangat setuju.



Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1 . Foto Kegiatan Sosialisasi Yang Di Lakukan Ketua Partai PAN Kepada Kader-KaderPartai PAN Di Kantor DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat. (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)



Gambar 2. Foto Kantor DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)



Gambar 3 . Foto Bersama Bapak Ir Antoni Ginting Selaku Ketua partai PAN Kabupaten Langkat. (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)



Gambar4 . Foto Wawancara Bersama Bapak Surkani SE.MM Selaku Sekretaris Partai PAN Kabupaten Langkat. (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)



Gambar 5. Foto Bersama Bapak Surkani SE.MM Selaku Sekretaris Partai PAN Kabupaten Langkat. (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)



Gambar 6. Foto Bersama Ibu Tini Selaku Kader Dari Partai PAN Kabupaten Langkat. (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)




**Gambar 7 . Foto Bersama Ibu Irma Selaku Masyarakat Kabupaten Langkat.
(Sumber : Dokumentasi penulis 2023)**



**Gambar 8. Foto Bersama Abang Rezi Supriadi S.H Selaku asisten Akademisi
(Sumber : Dokumentasi penulis 2023)**

Lampiran 4: Surat Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ✉ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 276/FIS.2/01.10/II/2023 15 Februari 2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
**Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

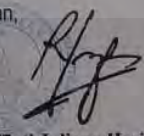
Nama : Shalsha Khairunnisa
N P M : 198520167
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat**, dengan judul Skripsi *"Kebijakan Partai Politik Amanat Nasional Kabupaten Langkat Dalam Melakukan Advokasi Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Penelitian Pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat)"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

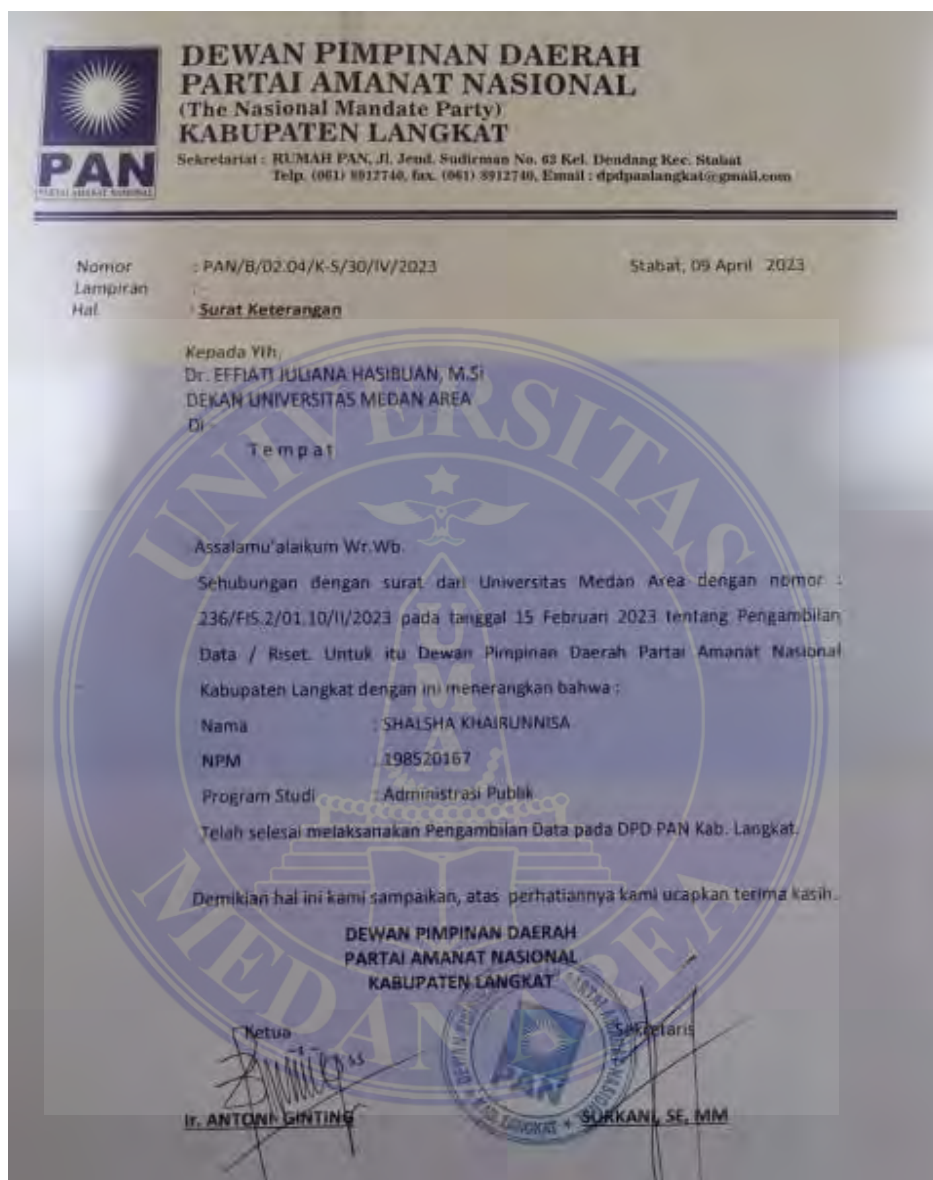
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Surat Pengantar Riset Dari Kampus (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)

Lampiran 5: Surat Selesai Riset



Surat Jeterangan Selesai Riset (Sumber : Dokumentasi penulis 2023)